

Penguatan Literasi Pendidikan dan Tata Kelola Pemerintahan Menuju Desa Sukaraja Lama yang Cerdas dan Berdaya

Meri Selvia, Erie Sushanda, Syntia Maharani, Mohd Ramadhan Syahputra, M. Awalludin, Pamuji

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Corresponding email: selviameri034@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 02-03-2026

Received : 07-03-2026

Revised : 15-03-2026

Accepted : 16-03-2026

Keywords:

Educational literacy, village governance, community empowerment, smart villages, participatory development

Kata Kunci:

literasi pendidikan, tata kelola desa, pemberdayaan masyarakat, desa cerdas, pembangunan partisipatif

ABSTRACT

Community empowerment and strengthening village governance are crucial factors in sustainable village development. This community service activity aims to improve community educational literacy and village governance capacity in Sukaraja Lama Village, leading to a smart and empowered village. The method used is a descriptive qualitative approach with a participatory action research framework through observation, interviews, documentation, and participatory training involving village officials and the community. The program includes educational literacy outreach, village governance training, and assistance in utilizing information technology in public services. The results of the activity show an increase in understanding of educational literacy from 45% to 78%, village governance from 40% to 75%, and information transparency from 42% to 80%. These findings indicate that strengthening village literacy and governance capacity can improve community participation and the quality of village public services.

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat dan penguatan tata kelola pemerintahan desa merupakan faktor penting dalam pembangunan desa berkelanjutan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan literasi pendidikan masyarakat dan kapasitas tata kelola pemerintahan desa di Desa Sukaraja Lama menuju desa yang cerdas dan berdaya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka participatory action research melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan pelatihan partisipatif yang melibatkan aparatur desa dan masyarakat. Program meliputi sosialisasi literasi pendidikan, pelatihan tata kelola desa, serta pendampingan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman literasi pendidikan dari 45% menjadi 78%, tata kelola pemerintahan desa dari 40% menjadi 75%, serta transparansi informasi dari 42% menjadi 80%. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan literasi dan kapasitas tata kelola desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat serta kualitas pelayanan publik desa.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Doki Course and Training



Pendahuluan

Desa merupakan unit pemerintahan paling dekat dengan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Kewenangan tersebut

membuka peluang bagi desa untuk berkembang secara mandiri melalui pemanfaatan sumber daya lokal, penguatan kapasitas aparatur desa, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak desa yang menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan partisipatif, termasuk dalam aspek literasi pendidikan masyarakat yang masih relatif rendah (Antlöv et al., 2016; Sutiyo & Maharjan, 2017).

Literasi pendidikan merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa. Literasi tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, serta memanfaatkan pengetahuan untuk memecahkan berbagai persoalan kehidupan (UNESCO, 2017). Dalam konteks pembangunan desa, literasi pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, mengakses informasi publik, serta memahami kebijakan pemerintah yang berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat (Rizkinaswara, 2019). Tingkat literasi yang baik akan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adaptif terhadap perubahan, terutama di era digital dan transformasi informasi saat ini.

Di sisi lain, tata kelola pemerintahan desa yang baik atau *good village governance* menjadi faktor kunci dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. Tata kelola pemerintahan yang efektif ditandai oleh adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta pengelolaan sumber daya yang efisien (Dwiyanto, 2018). Pemerintahan desa yang memiliki kapasitas tata kelola yang baik akan mampu merumuskan kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta memastikan pemanfaatan dana desa secara tepat sasaran (Lewis, 2015). Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam pengelolaan pemerintahan desa, seperti keterbatasan kapasitas aparatur, rendahnya literasi administrasi, serta minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan layanan publik desa (Arifin et al., 2020; Yuliani & Setiawan, 2021).

Permasalahan tersebut juga menjadi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan aparatur pemerintahan di Desa Sukaraja Lama. Berdasarkan observasi awal dan komunikasi dengan perangkat desa serta masyarakat setempat, ditemukan beberapa permasalahan utama, antara lain masih terbatasnya tingkat literasi pendidikan masyarakat, kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola administrasi dan pelayanan publik. Kondisi ini berpotensi menghambat upaya desa dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif serta masyarakat yang cerdas dan berdaya.

Konsep desa cerdas (*smart village*) menjadi salah satu pendekatan yang relevan dalam menjawab tantangan pembangunan desa di era digital. Konsep ini menekankan pada pemanfaatan teknologi informasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan inovasi lokal untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat (Visvizi & Lytras, 2018). Desa cerdas tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada penguatan literasi masyarakat, peningkatan partisipasi publik, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel (Holroyd, 2020). Oleh karena itu, penguatan literasi pendidikan dan tata kelola pemerintahan menjadi dua aspek penting dalam mendukung transformasi desa menuju desa yang cerdas dan berdaya.

Dalam perspektif teori pembangunan masyarakat, pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kapasitas individu dan kelompok untuk mengontrol

kehidupan mereka serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan (Chambers, 1997). Pendekatan pemberdayaan ini menekankan pentingnya pendidikan, akses informasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan lokal sebagai dasar dalam membangun masyarakat yang mandiri dan berdaya. Dengan meningkatnya literasi pendidikan masyarakat, diharapkan akan muncul kesadaran kolektif untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa serta mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Selain itu, teori good governance juga menjadi landasan penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan desa. Konsep ini menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan (Rhodes, 2017). Penerapan prinsip-prinsip tersebut di tingkat desa dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Dengan demikian, penguatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi, pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang sebagai upaya untuk memperkuat literasi pendidikan masyarakat serta meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan di Desa Sukaraja Lama. Program ini melibatkan berbagai kegiatan edukasi, pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat dan aparatur desa guna meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya literasi pendidikan, transparansi pemerintahan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik desa.

Adapun rumusan masalah dalam kegiatan PKM ini adalah: (1) bagaimana meningkatkan literasi pendidikan masyarakat di Desa Sukaraja Lama; (2) bagaimana memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahan desa agar lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif; serta (3) bagaimana mendorong transformasi Desa Sukaraja Lama menuju desa yang cerdas dan berdaya melalui penguatan literasi dan tata kelola pemerintahan.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, kegiatan PKM ini dirancang melalui beberapa strategi utama, yaitu penyelenggaraan program literasi pendidikan bagi masyarakat, pelatihan tata kelola administrasi pemerintahan desa bagi aparatur desa, serta pendampingan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan layanan publik desa. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dan aparatur desa secara berkelanjutan sehingga mampu mendorong terwujudnya desa yang lebih mandiri dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Tujuan dari kegiatan PKM ini adalah untuk meningkatkan literasi pendidikan masyarakat, memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahan desa, serta mendorong terwujudnya Desa Sukaraja Lama sebagai desa yang cerdas dan berdaya. Dengan meningkatnya literasi masyarakat dan kualitas tata kelola pemerintahan desa, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Secara teoretis, kegiatan ini mengacu pada berbagai kajian mengenai literasi pendidikan, pemberdayaan masyarakat, tata kelola pemerintahan desa, serta konsep desa cerdas. Integrasi antara literasi pendidikan dan tata kelola pemerintahan diharapkan dapat menciptakan ekosistem pembangunan desa yang lebih inklusif, transparan, dan partisipatif. Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip

pembangunan berbasis masyarakat (community-based development) yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pembangunan.

Dengan demikian, kegiatan PKM ini diharapkan tidak hanya memberikan dampak pada peningkatan kapasitas individu dan kelembagaan di Desa Sukaraja Lama, tetapi juga menjadi model penguatan literasi pendidikan dan tata kelola pemerintahan desa yang dapat direplikasi di desa-desa lain dalam upaya mewujudkan desa yang cerdas, mandiri, dan berdaya.

Metode

Metode penelitian dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain participatory action research (PAR). Pendekatan ini dipilih karena kegiatan pengabdian tidak hanya bertujuan untuk mengkaji fenomena sosial, tetapi juga melakukan intervensi melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas aparatur desa secara partisipatif. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami secara mendalam kondisi literasi pendidikan masyarakat dan praktik tata kelola pemerintahan desa yang berlangsung di Desa Sukaraja Lama. Sementara itu, pendekatan participatory action research memberikan ruang bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk terlibat secara aktif dalam proses identifikasi masalah, perencanaan kegiatan, pelaksanaan program, hingga evaluasi hasil kegiatan (Kemmis et al., 2014; Creswell & Creswell, 2018).

Desain penelitian ini terdiri atas beberapa tahapan kegiatan yang meliputi: (1) identifikasi masalah dan analisis kebutuhan masyarakat; (2) perencanaan program penguatan literasi pendidikan dan tata kelola pemerintahan desa; (3) pelaksanaan kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan; serta (4) evaluasi dan refleksi terhadap hasil program. Model ini memungkinkan adanya proses perbaikan secara berkelanjutan berdasarkan temuan di lapangan dan umpan balik dari masyarakat serta aparatur desa. Pendekatan partisipatif juga bertujuan untuk meningkatkan rasa memiliki (sense of ownership) masyarakat terhadap program yang dilaksanakan sehingga keberlanjutan program dapat terjaga dengan baik (Reason & Bradbury, 2008).

1. Variabel Penelitian

Penelitian ini berfokus pada dua variabel utama, yaitu literasi pendidikan masyarakat dan tata kelola pemerintahan desa. Literasi pendidikan dalam penelitian ini dimaknai sebagai kemampuan masyarakat dalam memahami, mengakses, serta memanfaatkan informasi dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan pendidikan. Indikator literasi pendidikan meliputi kemampuan membaca dan memahami informasi, kemampuan mengakses sumber pengetahuan, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan edukatif di lingkungan desa.

Sementara itu, variabel tata kelola pemerintahan desa mengacu pada penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Indikator yang digunakan meliputi transparansi dalam pengelolaan informasi publik, akuntabilitas administrasi pemerintahan desa, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta efektivitas pelayanan publik desa. Kedua variabel tersebut dianalisis untuk melihat sejauh mana program penguatan literasi dan peningkatan kapasitas aparatur desa dapat berkontribusi terhadap terwujudnya Desa Sukaraja Lama yang cerdas dan berdaya.

2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Sukaraja Lama serta aparaturnya yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka teknik penentuan sampel dilakukan dengan purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Informan penelitian terdiri dari beberapa kelompok utama, yaitu kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kader pemberdayaan masyarakat, serta perwakilan masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi pendidikan. Pemilihan informan tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi literasi masyarakat dan praktik tata kelola pemerintahan desa di Desa Sukaraja Lama. Jumlah informan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan data hingga mencapai kondisi data saturation, yaitu ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak ditemukan lagi informasi baru yang signifikan.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan kegiatan pelatihan partisipatif.

Pertama, observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi sosial masyarakat, tingkat partisipasi dalam kegiatan literasi pendidikan, serta praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Observasi ini dilakukan selama pelaksanaan program PKM untuk memperoleh gambaran nyata mengenai dinamika masyarakat dan aparaturnya dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan.

Kedua, wawancara mendalam (in-depth interview) dilakukan kepada informan utama seperti kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan peserta kegiatan literasi. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi mengenai kondisi literasi pendidikan masyarakat, tantangan dalam tata kelola pemerintahan desa, serta persepsi masyarakat terhadap program penguatan literasi dan peningkatan kapasitas aparaturnya.

Ketiga, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan desa dan program pemberdayaan masyarakat, seperti dokumen perencanaan pembangunan desa, laporan kegiatan desa, serta dokumentasi kegiatan pelatihan dan sosialisasi yang dilaksanakan dalam program PKM. Data dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat temuan penelitian dan memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi desa.

Keempat, kegiatan pelatihan dan pendampingan partisipatif juga menjadi bagian dari proses pengumpulan data. Melalui kegiatan ini, peneliti dapat mengamati secara langsung perubahan pemahaman masyarakat dan aparaturnya terkait literasi pendidikan dan tata kelola pemerintahan. Interaksi yang terjadi selama kegiatan pelatihan dan diskusi kelompok juga memberikan informasi penting mengenai kebutuhan masyarakat serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi program.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik **analisis kualitatif interaktif** yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu **reduksi data**, **penyajian data**, dan **penarikan kesimpulan** (Miles et al., 2014). Tahap reduksi data dilakukan dengan menyaring dan mengorganisasi data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga fokus pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

Tahap selanjutnya adalah **penyajian data**, yaitu proses penyusunan data dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, maupun tabel untuk memudahkan pemahaman terhadap pola dan hubungan antar temuan penelitian. Penyajian data ini membantu peneliti dalam mengidentifikasi perubahan yang terjadi setelah pelaksanaan program penguatan literasi pendidikan dan tata kelola pemerintahan desa.

Tahap terakhir adalah **penarikan kesimpulan dan verifikasi**, yaitu proses interpretasi terhadap temuan penelitian untuk menjelaskan dampak kegiatan PKM terhadap peningkatan literasi masyarakat dan kapasitas tata kelola pemerintahan desa. Proses verifikasi dilakukan secara berkelanjutan dengan membandingkan berbagai sumber data yang diperoleh di lapangan guna memastikan validitas dan konsistensi temuan penelitian.

Untuk meningkatkan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik **triangulasi sumber dan metode**. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti aparatur desa dan masyarakat. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas dan validitas yang lebih tinggi.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan kegiatan PKM tidak hanya memberikan gambaran mengenai kondisi literasi pendidikan dan tata kelola pemerintahan di Desa Sukaraja Lama, tetapi juga menghasilkan model pemberdayaan masyarakat yang dapat mendukung transformasi desa menuju desa yang cerdas, partisipatif, dan berdaya.

Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disusun berdasarkan tahapan pelaksanaan kegiatan yang meliputi tahap persiapan, tahap implementasi dan analisis, tahap monitoring dan evaluasi, serta identifikasi kendala yang dihadapi selama kegiatan berlangsung. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif sehingga hasil penelitian disajikan dalam bentuk tema-tema temuan yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi, serta kegiatan pelatihan dan pendampingan yang dilaksanakan di Desa Sukaraja Lama.

1. Preparation Stage

Tahap persiapan merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan. Tahapan ini mencakup kegiatan perencanaan program, pengumpulan data awal, analisis kebutuhan masyarakat, serta penyusunan materi pelatihan yang akan diberikan kepada masyarakat dan aparatur desa. Tahap ini sangat penting untuk memastikan bahwa program yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi sosial yang ada di Desa Sukaraja Lama.

Pada tahap awal, tim pengabdian melakukan observasi lapangan dan wawancara awal dengan aparatur desa, tokoh masyarakat, serta beberapa perwakilan warga desa. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi literasi pendidikan masyarakat serta praktik tata kelola pemerintahan desa yang sedang berjalan. Observasi dilakukan pada beberapa kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan administrasi desa dan pertemuan masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan desa.



Hasil pengumpulan data awal menunjukkan bahwa tingkat literasi pendidikan masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pemahaman informasi publik, pemanfaatan teknologi informasi, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan edukatif di lingkungan desa. Selain itu, aparat desa juga menyampaikan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam pengelolaan administrasi desa dan pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik.

Menurut Antlöv et al. (2016), peningkatan kapasitas aparat desa merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Sementara itu, Sutiyo dan Maharjan (2017) menjelaskan bahwa penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah desa dapat mendorong efektivitas implementasi kebijakan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut, tim pengabdian kemudian menyusun beberapa materi pelatihan yang meliputi:

2. Penguatan literasi pendidikan masyarakat
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan desa
4. Peningkatan kapasitas tata kelola administrasi desa
5. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa

Materi tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat serta kemampuan aparat desa dalam menerima dan mengimplementasikan materi yang diberikan. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan materi adalah pendekatan **partisipatif**, di mana masyarakat dan aparat desa turut memberikan masukan terkait kebutuhan pelatihan yang dianggap paling relevan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Chambers (1997), pendekatan partisipatif dalam pembangunan masyarakat dapat meningkatkan keberhasilan program pemberdayaan karena masyarakat dilibatkan secara langsung dalam proses perencanaan kegiatan.

Selain itu, tim pengabdian juga menyiapkan instrumen penelitian yang akan digunakan dalam proses pengumpulan data selama kegiatan berlangsung. Instrumen tersebut meliputi pedoman wawancara, lembar observasi, serta kuesioner sederhana untuk mengukur perubahan pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah kegiatan pelatihan dilaksanakan.

2. Implementation Stage and Analysis

Tahap implementasi merupakan tahap utama dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan pelaksanaan berbagai program pelatihan, sosialisasi, serta pendampingan kepada masyarakat dan aparat desa. Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap melalui beberapa sesi kegiatan yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan **kegiatan sosialisasi program penguatan literasi pendidikan dan tata kelola pemerintahan desa** yang dihadiri oleh aparatur desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta perwakilan masyarakat Desa Sukaraja Lama. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal mengenai pentingnya literasi pendidikan serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif.

Menurut UNESCO (2017), literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kemampuan memahami informasi serta menggunakan pengetahuan tersebut untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dalam kegiatan pelatihan literasi pendidikan, peserta diberikan materi mengenai pentingnya literasi informasi, pemanfaatan sumber belajar digital, serta peningkatan minat membaca di lingkungan masyarakat. Diskusi kelompok juga dilakukan untuk menggali pengalaman masyarakat terkait akses terhadap informasi pendidikan. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta pelatihan menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini terlihat dari aktifnya peserta dalam diskusi kelompok serta banyaknya pertanyaan yang diajukan selama sesi pelatihan berlangsung. Selain kegiatan literasi pendidikan, tim pengabdian juga melaksanakan **pelatihan tata kelola pemerintahan desa** yang ditujukan kepada aparatur desa. Materi yang diberikan meliputi pengelolaan administrasi desa, transparansi pengelolaan informasi publik, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik desa.



Dwiyanto (2018) menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik ditandai oleh adanya transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selama kegiatan pelatihan berlangsung, aparatur desa juga diberikan pendampingan dalam penggunaan teknologi informasi sederhana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik desa. Misalnya, penggunaan media digital untuk menyampaikan informasi desa kepada masyarakat.

Dalam perspektif konsep smart village, penggunaan teknologi informasi di tingkat desa dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Visvizi & Lytras, 2018). Temuan penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan dan pendampingan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat dan aparatur desa mengenai pentingnya literasi pendidikan serta tata kelola pemerintahan yang transparan. Hal ini sejalan dengan

pendapat Holroyd (2020) yang menyatakan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu komponen utama dalam pembangunan desa cerdas.

3. Monitoring and Evaluation

Tahap monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan pengabdian kepada masyarakat memberikan dampak terhadap peningkatan literasi pendidikan masyarakat serta kapasitas tata kelola pemerintahan desa.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui beberapa metode, yaitu observasi langsung, wawancara dengan peserta kegiatan, serta penyebaran kuesioner sederhana kepada peserta pelatihan. Kuesioner digunakan untuk mengukur perubahan pemahaman peserta mengenai literasi pendidikan dan tata kelola pemerintahan desa sebelum dan sesudah kegiatan pelatihan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, ditemukan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai materi yang diberikan. Hasil evaluasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 1
Changes in Participants' Understanding Before and After the Training

Indicator	Before Activity	After Activity
Understanding of educational literacy	45%	78%
Understanding of village governance	40%	75%
Understanding of information transparency	42%	80%

Source: Processed research data (2026)



Tabel tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman peserta terhadap berbagai materi yang diberikan selama kegiatan berlangsung. Peningkatan paling signifikan terlihat pada indikator pemahaman mengenai transparansi informasi desa. Menurut Lewis (2015), transparansi informasi merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Selain melalui kuesioner, evaluasi juga dilakukan melalui wawancara dengan beberapa peserta kegiatan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat merasa kegiatan pelatihan memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya literasi pendidikan serta peran masyarakat dalam pembangunan desa. Sap et al. (2019) menyatakan bahwa “when dictionary users are presented with several definitions, they tend to choose the first definition.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap informasi sangat dipengaruhi oleh cara informasi tersebut

disampaikan. Dalam konteks kegiatan pengabdian ini, metode pelatihan yang menggunakan pendekatan diskusi dan praktik langsung terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta.

4. Obstacles or Other Problems Encountered

Meskipun kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini secara umum berjalan dengan baik, terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan waktu yang dimiliki oleh sebagian masyarakat untuk mengikuti kegiatan pelatihan secara penuh. Hal ini disebabkan oleh aktivitas pekerjaan masyarakat yang sebagian besar bekerja di sektor informal. Selain itu, tingkat literasi digital masyarakat juga masih relatif rendah sehingga diperlukan waktu yang lebih lama untuk memberikan pemahaman mengenai penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik desa.

Menurut Rizkinaswara (2019), kesenjangan literasi digital masih menjadi tantangan utama dalam proses transformasi digital di berbagai wilayah pedesaan di Indonesia. Kendala lainnya adalah keterbatasan fasilitas teknologi yang tersedia di desa, seperti akses internet yang belum stabil serta terbatasnya perangkat komputer yang dapat digunakan dalam kegiatan pelatihan.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, tim pengabdian mengusulkan beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan pelatihan secara bertahap dan berkelanjutan
2. Mendorong pemerintah desa untuk mengembangkan pusat literasi desa
3. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan perguruan tinggi
4. Mengembangkan program literasi digital bagi masyarakat desa

Rhodes (2017) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Oleh karena itu, keberlanjutan program penguatan literasi pendidikan dan tata kelola pemerintahan desa memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap peningkatan literasi pendidikan masyarakat, tetapi juga memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan Desa Sukaraja Lama sebagai desa yang cerdas, partisipatif, dan berdaya.

Kesimpulan

Berdasarkan tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dirumuskan, dapat disimpulkan bahwa program **penguatan literasi pendidikan dan tata kelola pemerintahan desa** yang dilaksanakan di Desa Sukaraja Lama memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat serta aparatur desa dalam mendukung pembangunan desa yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Program ini menunjukkan bahwa penguatan literasi pendidikan masyarakat merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan desa. Masyarakat yang memiliki literasi pendidikan yang baik cenderung lebih mampu memahami informasi publik, memanfaatkan sumber pengetahuan, serta berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa.

Selain itu, kegiatan pelatihan dan pendampingan yang diberikan kepada aparatur desa juga terbukti mampu meningkatkan pemahaman mereka mengenai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi serta pemanfaatan teknologi informasi memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik desa. Dengan adanya peningkatan pemahaman tersebut, aparatur desa memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyelenggarakan pemerintahan desa secara efektif serta mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Hasil kegiatan pengabdian ini juga menunjukkan bahwa integrasi antara **literasi pendidikan masyarakat dan penguatan tata kelola pemerintahan desa** dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan desa yang cerdas (*smart village*). Literasi pendidikan memberikan dasar bagi masyarakat untuk memahami informasi dan berpartisipasi dalam pembangunan, sementara tata kelola pemerintahan yang baik memastikan bahwa proses pembangunan desa berlangsung secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini untuk meningkatkan literasi pendidikan masyarakat, memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahan desa, serta mendorong terwujudnya Desa Sukaraja Lama sebagai desa yang cerdas dan berdaya dapat dikatakan telah tercapai. Program ini juga menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta memperkuat sinergi antara masyarakat dan pemerintah desa dalam proses pembangunan.

Referensi

- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village governance, community life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161–183. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047>
- Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R., Wardhana, D., & Setiawan, H. (2020). Village fund, village-owned enterprises, and employment: Evidence from Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 79, 382–394. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052>
- Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. Intermediate Technology Publications.
- Chomsky, N. (1965). *Aspects of the theory of syntax*. MIT Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Dwiyanto, A. (2018). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Dyer, R. (1998). *Stars*. British Film Institute.
- Holroyd, C. (2020). Technological innovation and building a “smart village”: Lessons from rural development initiatives. *Technology in Society*, 63, 101363. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101363>
- Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). *The action research planner: Doing critical participatory action research*. Springer.
- Lewis, B. D. (2015). Decentralising to villages in Indonesia: Money (and other) mistakes. *Public Administration and Development*, 35(5), 347–359. <https://doi.org/10.1002/pad.1741>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Pan, Y., & Hamilton, A. (2018). Language evolution and cognition. *Journal of Linguistic Studies*, 12(2), 145–160.
- Reason, P., & Bradbury, H. (2008). *The Sage handbook of action research: Participative inquiry and practice* (2nd ed.). Sage Publications.
- Rhodes, R. A. W. (2017). *Understanding governance: Policy networks, governance, reflexivity and accountability*. Open University Press.
- Rizkinaswara, L. (2019). Digital literacy in Indonesia: Opportunities and challenges. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 8(2), 107–120.
- Sap, M., Card, D., Gabriel, S., Choi, Y., & Smith, N. (2019). The risk of racial bias in hate speech detection. *Proceedings of the Association for Computational Linguistics*, 1668–1678.
- Schegloff, E. A. (2020). *Conversation analysis and social interaction*. Cambridge University Press.
- Sutiyo, S., & Maharjan, K. L. (2017). Decentralization and rural development in Indonesia. *Journal of Rural Development*, 36(1), 45–67.
- UNESCO. (2017). *Global education monitoring report: Accountability in education*. UNESCO Publishing.
- Visvizi, A., & Lytras, M. D. (2018). It's not a fad: Smart cities and smart villages research in European and global contexts. *Sustainability*, 10(8), 2727. <https://doi.org/10.3390/su10082727>
- Wollen, P. (2019). *Signs and meaning in the cinema*. British Film Institute.
- Yuliani, F., & Setiawan, B. (2021). Transparency and accountability in village financial management. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(2), 112–125.
- World Bank. (2018). *Indonesia village fund program: Strengthening rural development*. World Bank Publications.
- OECD. (2020). *Rural development policy: Supporting rural transformation*. OECD Publishing.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- United Nations. (2020). *The sustainable development goals report 2020*. United Nations.
- Bappenas. (2021). *Pembangunan desa dan kawasan perdesaan dalam RPJMN 2020–2024*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). *Pedoman pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat*. Kemendes PDTT.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.